

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2024



<https://belukabps.belu.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BELU**



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

## KABUPATEN BELU

TAHUN 2024



## INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2024

ISSN :  
Nomor Publikasi : 5306.24022  
Katalog BPS : 4102004.5306  
Ukuran Buku : 28 cm x 22 cm  
Jumlah Halaman : xv + 57

Naskah :

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu*

Gambar Kulit :

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu*

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu  
Jl. DR. G.A. Siwabessy No 2 Atambua  
Telp : 0389 – 21317, Fax : 0389 – 21317  
e-mail : [bps5306@bps.go.id](mailto:bps5306@bps.go.id)  
web : [belukab.bps.go.id](http://belukab.bps.go.id)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2024

## Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ramly K. T. Kusumo, SP, M.AP.

Editor : Santana Antonio E. Soares, S.Si

Penulis & Pengolah Data : Moh. Rifki Arif, S.Tr.Stat

Penyiapan Draft : Agus Sofiana, SST

Kontributor Data : Seksi Statistik Sosial BPS

<https://belukab.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BELU TAHUN 2024** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat kabupaten Belu antar waktu dan perbandingannya baik antar kecamatan maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu Tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Belu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Atambua, September 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Belu,

**Ramly K. T. Kusumo, SP, M.AP**

<https://belukab.bps.go.id>



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Datar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Istilah Teknis .....	xv
1. Kependudukan .....	1
2. Kesehatan dan Gizi .....	11
3. Pendidikan .....	19
4. Ketenagakerjaan .....	29
5. Konsumsi dan Pengeluaran .....	35
6. Perumahan dan Lingkungan .....	41
7. Kemiskinan .....	47
Lampiran .....	53
Daftar Pustaka .....	57

<https://belukab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tabel 1.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2019-2024	3
2	Tabel 1.2 Persentase Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan tahun 2023	5
3	Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabuapten Belu 2023	8
4	Tabel 1.3 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun berstatus pernah kawin menurut partisipasi KB	9
5	Tabel 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup, 2020-2023	14
6	Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2023	15
7	Tabel 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2023	15
8	Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2023	16
9	Tabel 2.5 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2021-2023	17
10	Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Belu, 2021-2023	24
10	Tabel 3.2 APS Kabupaten/Kota di Daratan Timor Tahun 2023	25
11	Tabel 3.3. Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2023	27
12	Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2022 dan 2023	31
13	Tabel 4.2 Penduduk bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, 2022 dan 2023	33
14	Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2022-2023	38
15	Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kuintil Pengeluaran, 2023 (Rupiah)	39
16	Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Kuintil Pengeluaran, 2023	40
17	Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2023	44

No	Judul	Halaman
18	Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan 2022	46
19	Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2022	46
20	Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Belu, 2017-2023	50
21	Tabel 7.2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2016-2023	51

<https://belukab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Belu per kecamatan tahun 2023	4
2	Gambar 1.2 Persebaran penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan tahun 2023	5
3	Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Belu menurut Kelompok umur tahun 2023	7
4	Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Belu, 2021-2023	23
5	Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Belu, 2021-2023	23
6	Gambar 3.3 APS Penduduk di daratan Timor tahun 2023	25
7	Gambar 3.4 APS Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Kelompok umur tahun 2023	26
8	Gambar 3.5 APM Penduduk Kabupaten Belu menurut jenjang pendidikan tahun 2022	26
9	Gambar 3.6 Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2022	27
10	Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita/Bulan, 2022-2023	38

<https://belukab.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, Maret 2022	55
2	Lampiran 2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belu, Desember	56
3	Lampiran 3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut penguasaan Telepon Seluler di kabupaten Belu tahun 2021	56

<https://belukab.bps.go.id>



## **SINGKATAN DAN AKRONIM / ABBREVIATION AND ACRONYMS**

AKB/IMR Angka Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate*  
APM/NER Angka Partisipasi Murni/*Net Enrollment Ratio*  
APS/SER Angka Partisipasi Sekolah/*School Enrollment Ratio*  
ASI Air Susu Ibu/*Breast Feeding*  
BPS Badan Pusat Statistik/*Statistics - Indonesia*  
KB Keluarga Berencana/*Family Planning*  
Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional/*National Labour Force Survey*  
SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/*Indonesian Demographic and Health Survey*  
SD/PS Sekolah Dasar/*Primary School*  
SM/SHS Sekolah Menengah/*Senior High School*  
SMP/JHS Sekolah Menengah Pertama/*Junior High School*  
SP Sensus Penduduk/*Population Census*  
SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus/*Intercensal Population Survey*  
Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional/*National Socio Economic Survey*  
TFR *Total Fertility Rate* (Angka Fertilitas Total)  
TPAK/LFPR Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/*Labour Force Participation Rate*  
TPT/OUR Tingkat Pengangguran Terbuka/*Open Unemployment Rate*



**KEPENDUDUKAN**

**1**

<https://belukap.bps.go.id>



Penduduk merupakan modal dasar pembangunan sebuah negara karena sebagai pelaku utama sekaligus pengguna dari hasil - hasil pembangunan tersebut. Namun jumlah penduduk yang tidak seimbang, dalam arti komposisi penduduk yang didominasi umur muda dan distribusi penduduk antar wilayah tidak merata maka akan menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggi akan mendatangkan berbagai masalah sosial-ekonomi manakala tidak diimbangi dengan ketersediaan “resources” yang memadai. Jumlah penduduk akan menjadi aset pembangunan apabila memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai serta laju pertumbuhannya dapat dikendalikan dan direncanakan.

#### A. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan bahwa rata-rata telah terjadi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Belu yang cukup signifikan selama kurun waktu tersebut.

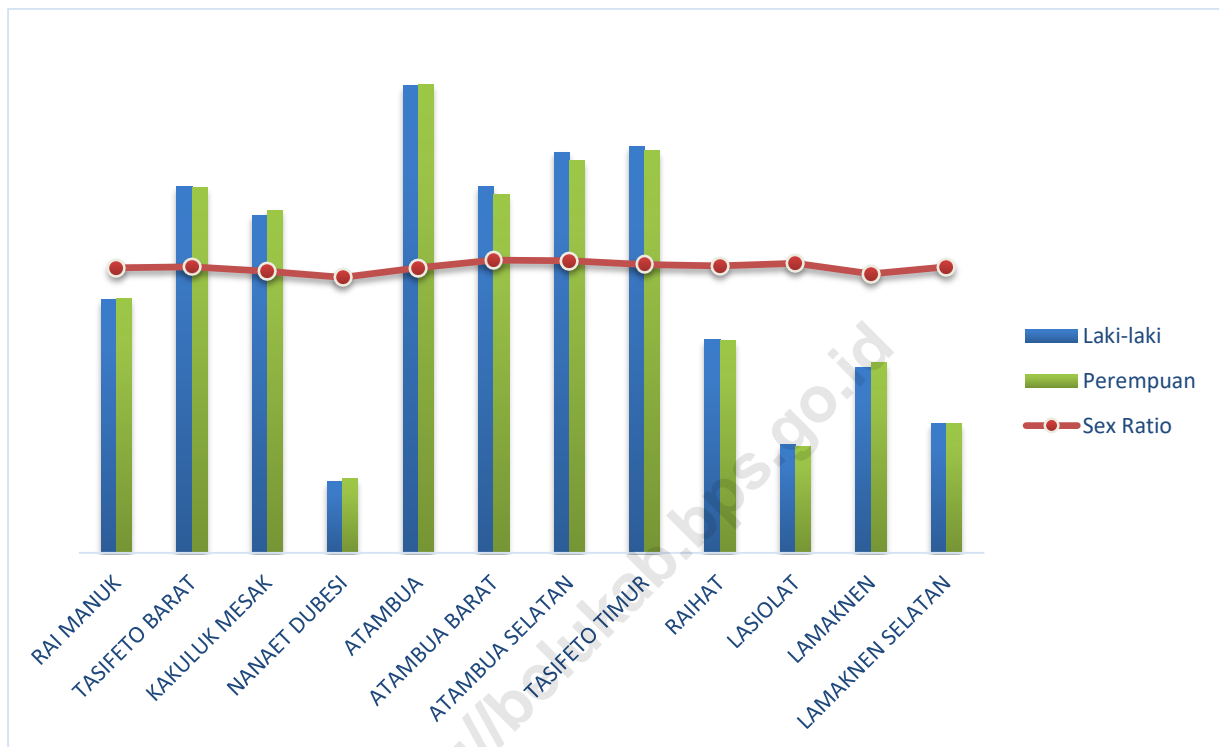
Tabel 1.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2019-2024

Tahun	Jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2019	220254	1,60
2020	217213	-1,38
2021	221.605	2,02
2022	226.307	2,12
2023	231.008	2,08
2024	235.709	2,03

Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2050

Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Belu mengalami penurunan sebanyak 4,50 persen (8.770 jiwa) yang diakibatkan oleh revisi metode dan dasar perhitungan proyeksi penduduk, perhitungan ini juga dilakukan penyesuaian berdasarkan data hasil pendataan SP2020. Secara umum penduduk Kabupaten Malaka mengalami pertumbuhan positif, hal ini dipengaruhi angka kelahiran dan migrasi masuk.

Data tahun 2024 menurut hasil proyeksi penduduk Belu ada sebanyak 235.709 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,03 persen. Rasio Jenis kelamin pada tahun 2024 adalah 100,15. Secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan terlihat pada grafik berikut.



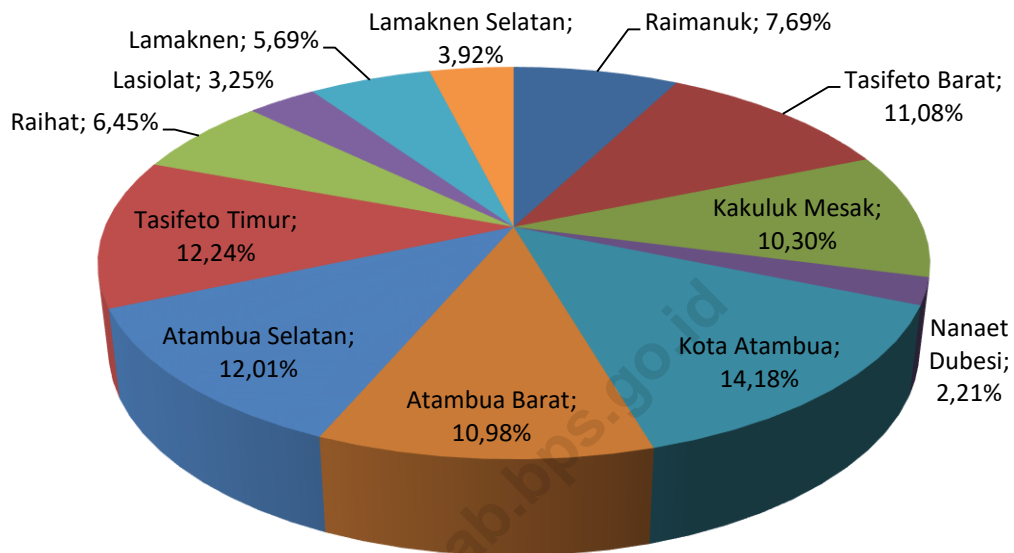
Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2050

Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Belu per kecamatan tahun 2023

Kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan terdapat pada Kecamatan Tasifeto Barat, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, dan Lamaknen Selatan. Kecamatan dengan rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terendah adalah kecamatan Nanaet Dubesi dimana hanya terdapat 96 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belu pada tahun 2023 adalah 115.654 jiwa sementara penduduk perempuan adalah 115.354 jiwa. Dengan kata lain penduduk laki-laki di Kabupaten Belu pada tahun 2023 adalah lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

## B. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Topografi Kabupaten Belu yang memiliki karakteristik berbukit-bukit, wilayah pemukiman sejak zaman lampau menurut adat istiadat dan pusat kegiatan ekonomi ditengarai menjadi penyebab tidak meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Belu.



Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2050

Gambar 1.2 Persebaran penduduk Kabupaten Belu menurut kecamatan tahun 2023

Tabel 1.2 Persentase Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan tahun 2023

Kecamatan	Persentase penduduk	Persentase Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Raimanuk	7,69	13,96	99,03
Tasifeto Barat	11,08	17,45	114,18
Kakuluk Mesak	10,30	14,60	126,94
Nanaet Dubesi	2,21	4,69	84,85
Kota Atambua	14,18	1,94	1315,14
Atambua Barat	10,98	1,21	1630,74
Atambua Selatan	12,01	1,22	1763,06
Tasifeto Timur	12,24	16,45	133,77
Raihat	6,45	6,79	170,84
Lasiolat	3,25	5,02	116,36
Lamaknen	5,69	8,24	124,16
Lamaknen Selatan	3,92	8,44	83,59

Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2050

Kecamatan dengan persentase luas wilayah terkecil adalah Atambua Barat dan kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Nanaet Duabesi dan Lasiolat. Kecamatan dengan persentase luas wilayah terbesar adalah Tasifeto Barat disusul Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak. Kecamatan dengan persentase penduduk terbesar adalah Kota Atambua, diikuti Tasifeto Timur, dan Atambua Selatan.

Pola kepadatan penduduk di Kabupaten Belu cenderung berbanding lurus mengikuti perkembangan aktivitas sosial ekonomi kecamatannya masing-masing tetapi berbanding terbalik dengan dan proporsi luas wilayahnya. Kecamatan dengan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi menjadi daya Tarik tingkat hunian penduduk. Walaupun secara luas wilayah kecil kecamatan pusat kegiatan aktivitas ekonomi terlihat lebih padat dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Sebagai pusat kegiatan aktivitas ekonomi, Kecamatan Atambua Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1.763 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2023, menyusul Atambua Barat 1.631 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Atambua 1.315 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu Kecamatan Nanaet Dubesi dan Lamaknen Selatan menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni masing-masing 85 dan 84 jiwa per km<sup>2</sup>.

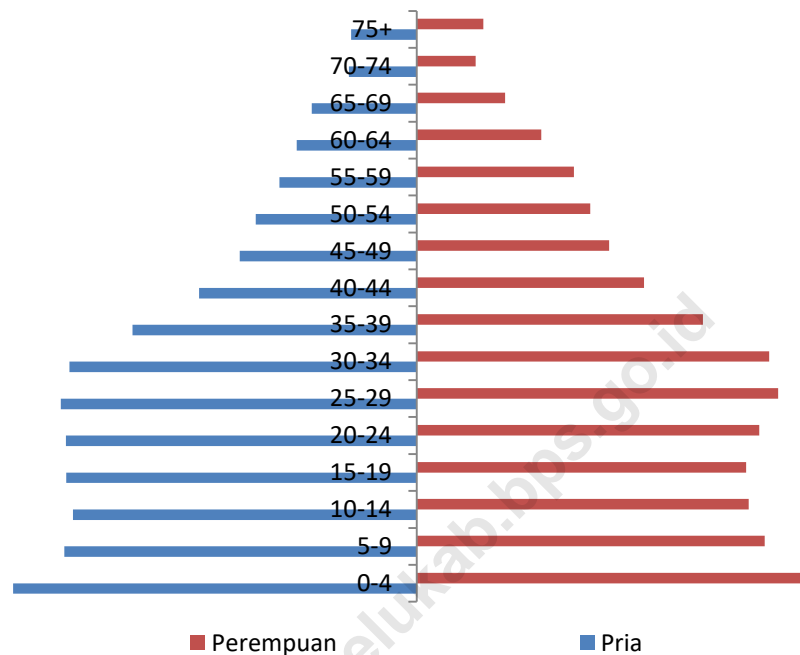
### **C. Komposisi Umur dan Angka Beban Ketergantungan**

Komposisi umur lebih banyak dipengaruhi oleh arah perkembangan penduduk secara alamiah yakni variabel kelahiran dan kematian. Dengan mengandalkan pada pertumbuhan penduduk alamiah maka apabila tingkat kematian menurun, sementara tingkat kelahiran naik atau tetap, maka bagian penduduk yang tergolong anak-anak akan meningkat dan secara ekonomi ikut mempengaruhi tingginya beban ketergantungan. Komposisi umur penduduk produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) pada tahun 2023 sebesar 65,8 persen. Sementara angka penduduk non produktif sebesar 34,2 persen, dengan rincian 82,77 persen dari kelompok usia belum produktif dan 17,23 persen dari usia tidak produktif.

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Belu terlihat penduduk usia 0-4 tahun persentasenya lebih besar dari kelompok umur lainnya. Kelompok umur tersebut lebih besar dari pada kelompok umur lainnya merupakan salah satu dampak dari pandemi covid yang dimana waktu lebih banyak dihabiskan di dalam rumah sehingga bukan hanya tingkat kematian meningkat namun kelahiran juga ikut meningkat. Piramida cenderung berbentuk



segitiga yang dimana sebagian besar penduduknya berusia muda hal tersebut menandakan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Penduduk Laki-laki usia produktif tertinggi pada kelompok usia 25-29 tahun dengan persentase lebih dari 14 persen terhadap total penduduk laki-laki usia produktif.



Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2050

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Belu menurut Kelompok umur tahun 2023

Pada umumnya Angka beban tanggungan merupakan perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif merupakan usia angkatan kerja, yang telah mampu untuk memperoleh penghasilan ataupun memenuhi kebutuhannya. Penduduk usia non produktif merupakan kelompok penduduk anak-anak dan lanjut usia yang bukan termasuk angkatan kerja. Angka beban tanggungan yang tinggi menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Pada tahun 2023, angka beban ketergantungan Kabupaten Belu berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 51,97. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 52 orang penduduk belum dan tidak produktif. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 52,97. Dilihat berdasarkan kelompok penduduk usia tidak produktif, beban tanggungan anak di Kabupaten Belu mulai naik dari

42,89 pada tahun 2022 menjadi 43,02 pada tahun 2023. Begitupun juga dengan angka beban tanggungan lanjut usia juga mengalami peningkatan dari 8,27 pada tahun 2022 menjadi 8,96 pada tahun 2023. Angka beban tanggungan anak yang tinggi menggambarkan bahwa laju kelahiran yang tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabuapten Belu 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>67.347</b>	<b>48.191</b>	<b>115.438</b>
Bekerja	63.943	45.200	109.143
Pengangguran Terbuka	3.404	2.891	6.295
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>15.449</b>	<b>35.178</b>	<b>50.727</b>
Sekolah	5.229	7.389	12.618
Mengurus Rumah Tangga	3.301	25.021	28.322
Lainnya	6.919	2.868	9.787
<b>Jumlah</b>	<b>82.796</b>	<b>83.369</b>	<b>166.165</b>

Sumber: Sakernas

#### D. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan kesehatan perempuan usia subur (15-49 tahun) dalam siklus haid, masa hamil, melahirkan dan menyusui. Kesehatan reproduksi menjadi sangat penting karena berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Diabaikannya kondisi kesehatan pada masa hamil, melahirkan atau menyusui dapat menyebabkan gangguan fisik, kesehatan ataupun mental bahkan kematian bagi perempuan maupun bayinya.

Fertilitas sangat dipengaruhi oleh usia kawin pertama perempuan dan angka prevalensi keluarga berencana (KB). Usia perkawinan pertama seorang perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, akan akan semakin besar resiko keselamatan ibu maupun anak selama masa kehamilan maupun saat melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya rahim

untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental dalam menghadapi masa kehamilan maupun saat melahirkan. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi usia perkawinan pertama, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan dan masa melahirkan.

Pada tingkat nasional keberhasilan program keluarga berencana telah diakui banyak kalangan. Untuk Kabupaten Belu, implementasi Program Keluarga Berencana di tingkat daerah sedikit banyak membawa dampak yang positif. Dalam kurun waktu 1989-1990 seorang wanita di Belu jika ia hidup sampai akhir masa reproduksinya, rata-rata dapat melahirkan lebih dari 4 orang anak. Angka tersebut lebih dikenal dengan istilah angka kelahiran total (TFR = Total Fertility Rate). Berdasarkan hasil Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dan 2017, TFR Propinsi NTT meningkat dari 3,3 menjadi 3,4.

Meningkatnya TFR sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama merupakan umur pertama menikah, terutama untuk penduduk perempuan, yang berarti bahwa masa dimulainya reproduksi pembuahan. Semakin muda seorang wanita melaksanakan perkawinan pertama, maka semakin panjang usia reproduksinya, yang berarti peluang untuk melahirkan banyak anak akan semakin besar. Kasus melahirkan pada perempuan umur 15-49 tahun dengan bayi lahir hidup kurang dari 2,5 kg dalam satu tahun terakhir sebesar 17,09 persen kasus. Pada wanita usia subur (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin, 61,36 persen diantaranya pernah/sedang menggunakan alat/cara KB sementara 38,64 persen lainnya tidak pernah menggunakan.

Tabel 1.4 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun berstatus pernah kawin menurut partisipasi KB

<b>Status penggunaan KB</b>	<b>Tahun 2023 (%)</b>
(1)	(2)
Pernah Menggunakan	25,30
Sedang Menggunakan	36,06
Tidak Pernah Menggunakan	38,64



# 2

## KESEHATAN DAN GIZI

<https://pelukab.bps.go.id>



Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Umur Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan Penduduk, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### **Derajat dan Status Kesehatan Penduduk**

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka usia harapan hidup penduduknya. Sumber data perkembangan Umur harapan

hidup, pada tabel 2.1 dibawah ini merujuk pada publikasi Indeks Pembangunan Manusia. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Belu, telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup. Di Kabupaten Belu tahun 2023 tercatat harapan usia hidup berada pada kisaran umur 73,97 tahun, lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 73,58 tahun. Peningkatan Umur harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial- ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup Hasil LFSP2020, 2020-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)
(1)	(2)
2020	72,83
2021	73,14
2022	73,58
2023	73,97

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Belu mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2022 yaitu dari 12,75 persen menjadi 8,79 persen. Hal tersebut menandakan tingkat kesehatan di



Kabupaten Belu telah meningkat cukup jauh daripada tahun 2022. Angka Kesakitan penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2023 lebih rendah dari penduduk berjenis kelamin perempuan, yakni masing-masing sekitar 8,65 persen untuk laki-laki dan 8,92 persen untuk perempuan. Lebih rendahnya angka kesakitan penduduk laki-laki dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk perempuan tidak terlepas dari anatomi fisik laki-laki yang memang lebih kuat dibandingkan perempuan.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2023

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Angka Kesakitan</b>
(1)	(2)
Laki-Laki	8,65
Perempuan	8,92
<b>Kabupaten Belu</b>	<b>8,79</b>

Catatan : Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang pernah mengalami sakit

### **Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa/kelurahan.

Tabel 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2023

<b>Karakteristik</b>	<b>2023</b>
(1)	(2)
Melahirkan di fasilitas kesehatan	98,05
Melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan	98,05

Pada tahun 20223 sebanyak 98,05 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Samanya Besar persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dengan yang melahirkan di fasilitas kesehatan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 semua perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin seluruhnya melahirkan di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil akan keselamatan selama proses persalinan.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2023

Jenis Kelamin	Pengguna Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Laki-Laki	49,10
Perempuan	54,50
Kabupaten Belu	51,45

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN. Pemanfaatan jaminan kesehatan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah nasional maupun daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan bantuan kesehatan yang disediakan bagi pemerintah mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.4, terlihat bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan secara umum sebesar 51,45 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penggunaan jaminan kesehatan bagi penduduk perempuan di Kabupaten Belu lebih tinggi bila

dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya. Hal ini juga tidak terlepas dari angka kesakitan penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 54,50 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 49,10 persen.

Tabel 2.5 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2021-2023

<b>Puskesmas dan Rasionya</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Puskesmas	16	17	17
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	2,17	2,25	2,21

Berdasarkan Tabel 2.5 menunjukkan bahwa terjadi penambahan ketersediaan sarana puskesmas pada tahun 2022 di Kabupaten Belu. Dengan demikian, jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Belu pada tahun 2022 adalah sebanyak 17 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Belu. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu 2,25 per 30.000 penduduk pada tahun 2022. Pada 2023 jumlah puskesmas masih sama dengan tahun 2022 namun rasio puskesmasnya mengalami sedikit penurunan menjadi 2,21 yang diakibatkan penambahan penduduk pada setiap tahunnya.



<https://belukab.bps.go.id>

**3**

**PENDIDIKAN**



Salah satu tugas pokok pemerintah berdasarkan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat sekali kaitannya dengan kualitas Pendidikan nasional, sementara pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh pembangunan pendidikan di masing-masing daerah. Program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa dalam berbagai aspek pembangunan karena pendidikan yang berhasil akan membentuk kualitas sumber daya manusia untuk menjadi modal sekaligus pelaku utama dari seluruh proses pembangunan. Indikator pendidikan antara lain angka melek huruf dan buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk, ketersediaan sarana pendidikan, dan partisipasi penduduk usia sekolah.

### **Angka Melek Huruf dan Buta Huruf**

Salah satu indikator yang dapat mengukur capaian di bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. AMH yang semakin tinggi di suatu wilayah mengindikasikan mutu serta kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut semakin baik. Peningkatan AMH selalu sejalan dengan penurunan angka buta huruf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatnya AMH secara tidak langsung menggambarkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menyerap informasi, meningkatkan intelektualitas pribadi serta berkomunikasi secara tertulis. AMH didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas, AMH penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2023 sebesar 93,66. Perkembangan AMH laki-laki sedikit lebih besar dari AMH perempuan, dimana AMH laki-laki 93,80 sedangkan AMH perempuan 93,54. Fenomena ini terjadi dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2023 angkanya semakin membesar yang menandakan bahwa di Kabupaten Belu kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan untuk laki-laki dan perempuan sudah semakin membaik.

## Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

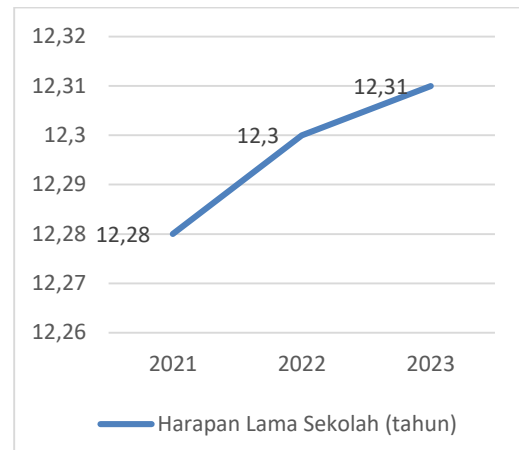
Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.



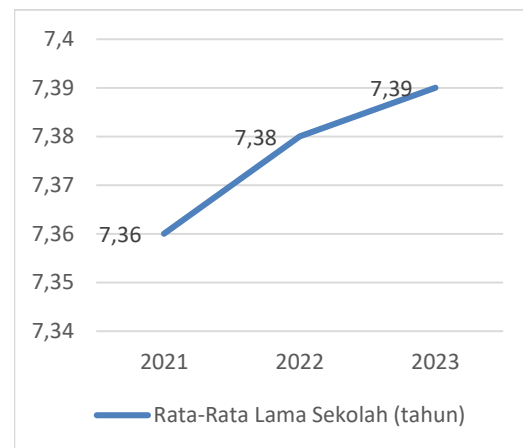
Pada tahun 2023, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu bila dibandingkan dengan tahun 2022. HLS naik dari 12,28 pada tahun 2021 menjadi 12,30 tahun 2022 dan pada tahun 2023 HLS naik menjadi 12,31. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2023, menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,31 tahun atau hingga mereka menamatkan Pendidikan SMA sederajat. Kenaikan HLS setiap tahun ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Belu.



Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Belu, 2021-2023

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Belu pada tahun 2021 tercatat masih berada di angka 7,36 tahun. Kemudian, angka tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 7,38 tahun. Hingga pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah Belu tercatat sebesar 7,39 tahun. Ini berarti pada tahun 2023, secara rata-rata penduduk



Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Belu, 2021-2023

Kabupaten Belu usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1). Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Belu yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah saat berada di kelas 2 SMP.

Pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belu. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan outcome dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Belu, 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,28	12,30	12,31
Rata-Rata Lama Sekolah	7,36	7,38	7,39

### **Tingkat Partisipasi Penduduk Usia Sekolah**

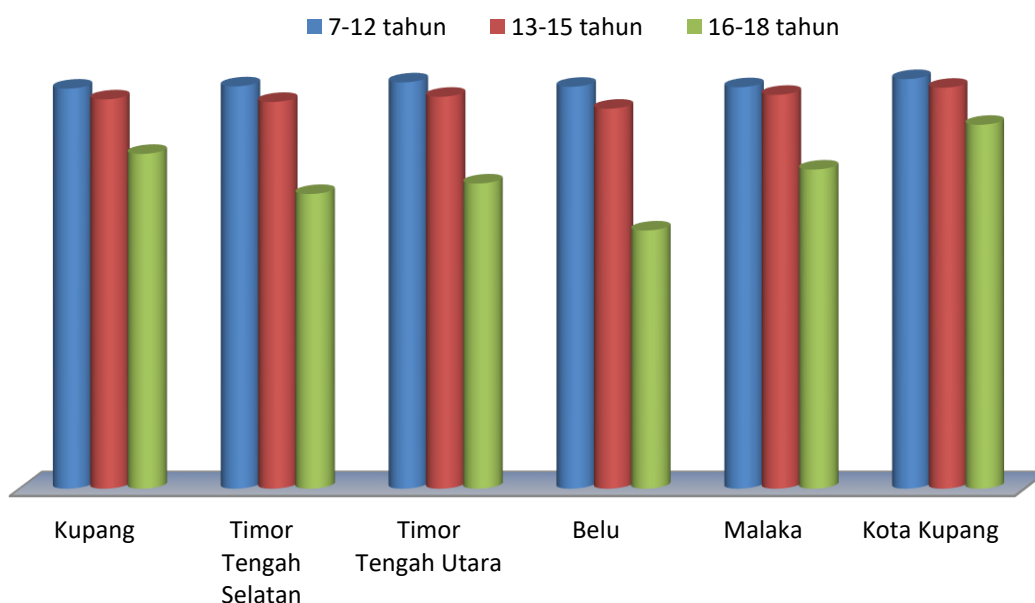
Indikator pendidikan penting lainnya selain rata-rata lama sekolah adalah partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang

diduduki. Berdasarkan data susenas 2023 rata-rata APS Kabupaten Belu dan beberapa Kabupaten/Kota di tahun 2023 terlihat pada table 3.1

Tabel 3.2 APS Kabupaten/Kota di Daratan Timor Tahun 2023

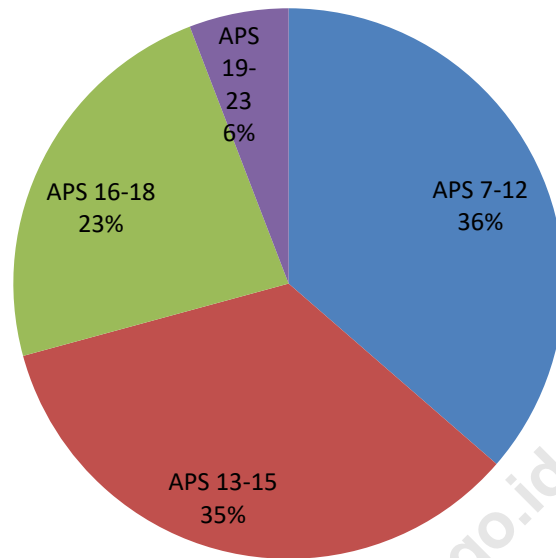
No	Kabupaten	7-12 Tahun	13- 15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kupang	97,38	94,77	81,52
2	Timor Tengah Selatan	97,93	94,15	71,77
3	Timor Tengah Utara	98,90	95,40	74,32
4	Belu	97,83	92,50	62,90
5	Malaka	97,72	95,87	77,71
6	Kota Kupang	99,70	97,59	88,58

Berdasarkan informasi pada tabel 3.1 diatas terlihat APS Kota Kupang tahun 2023 menempati posisi tertinggi di daratan timor pada semua kelompok usia. Ini wajar karena akses untuk memperoleh pelayanan pendidikan lebih mudah, ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih beragam. Untuk Kabupaten Belu APS usia 7-12 tahun menempati posisi keempat, menempati posisi terakhir untuk usia 13- 15 tahun dan 16- 18 tahun.



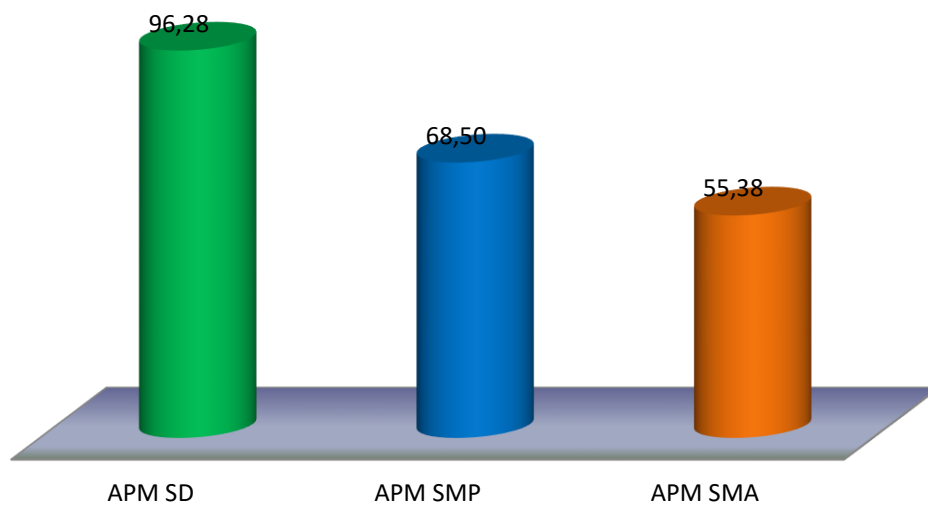
Gambar 3.3 APS Penduduk di daratan Timor tahun 2023

APS penduduk Kabupaten Belu berdasarkan kelompok umur terlihat pada diagram berikut.



Gambar 3.4 APS Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Kelompok umur tahun 2023

Selain APS, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan diperlukan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK). APM menggambarkan persentase anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya sedangkan APK menggambarkan persentase anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur anak. Berdasarkan data susenas APM penduduk Kabupaten Belu menurut jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut.



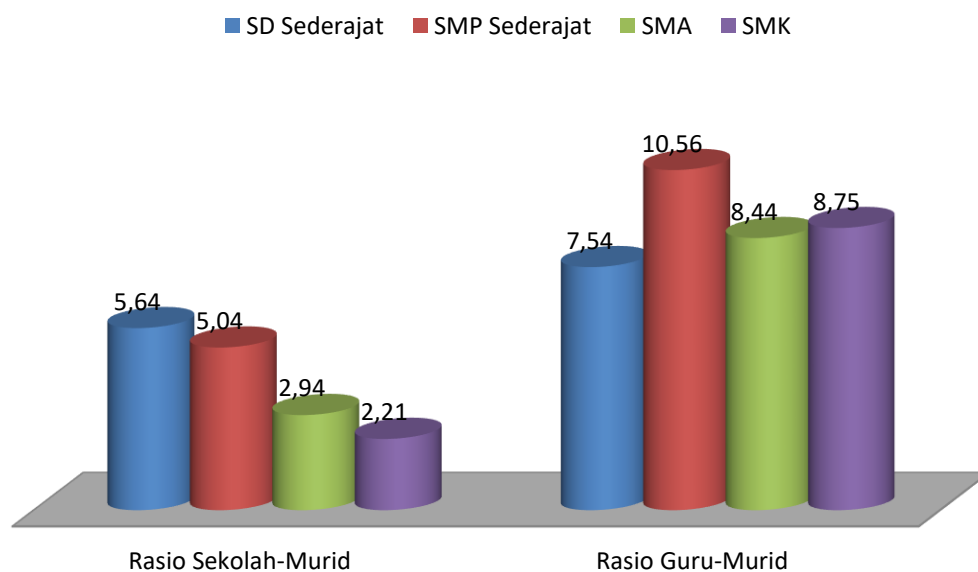
Gambar 3.5 APM Penduduk Kabupaten Belu menurut jenjang pendidikan tahun 2023

## Ketersediaan Sarana Pendidikan

Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan profil pendidikan adalah melalui rasio murid–sekolah dan rasio murid-guru. Pemerataan akses pendidikan adalah melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi rasio murid-guru berarti bahwa semakin banyak peserta didik yang harus diajar oleh seorang guru dan berarti pula proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Belu selama tahun ajaran 2022/2023, rasio murid-guru SD dan SMP mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Tabel 3.3. Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2023

NO	Uraian	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekolah	150	58	25	10
2	Guru	2.004	1.215	717	397
3	Murid	26.581	11.510	8.493	4.535



Gambar 3.6. Jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Belu Tahun 2023



4

# KETENAGAKERJAAN

<https://melukab.bps.go.id>





Masalah kependudukan sangat erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Ketersediaan tenaga kerja sangat tergantung pada besar kecilnya penambahan penduduk. Penyediaan atau penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti kesempatan kerja yang memadai akan menimbulkan pengangguran. Dengan demikian banyaknya penduduk yang tidak memperoleh lapangan pekerjaan maka akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

### A. Kegiatan Penduduk Usia Kerja dan TPAK

Menurut hasil sakernas 2023 jumlah penduduk usia kerja (umur 15 tahun keatas) di Kabupaten Belu sebanyak 166.165 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) sebanyak 69,47 persen (115.438 orang) yang 94,55 persen diantaranya sudah memiliki pekerjaan. Sisanya 30,53 persen (50.727 orang) tergolong bukan angkatan kerja. Dari jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, kegiatan utamanya seminggu lalu (dalam kurun waktu pelaksanaan survei) bersekolah sebanyak 24,87 persen, mengurus rumah tangga 55,83 persen dan kegiatan lainnya seperti pensiunan yang tidak bekerja, orang lumpuh dan orang jompo sebanyak 19,29 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan seberapa besar kesiapan penduduk usia kerja untuk terjun kedalam pasar kerja. TPAK penduduk Kabupaten Belu tahun 2023 sebesar 69,47 persen dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan TPAK tahun 2022 sebesar 66,62 persen.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , 2022 dan 2023

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belu	66,62	69,47	6,00	5,45

Secara umum, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 menunjukkan penurunan dibanding Agustus 2022. TPT Agustus 2022 tercatat sebesar 6,00 persen, menurun menjadi 5,45 persen pada Agustus 2023. Penurunan TPT ini mengindikasikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja bila dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu dipertahankan pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Kabupaten Belu.

## **B. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.**

Secara keseluruhan dari jumlah penduduk yang bekerja, masih cukup banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga (pekerja tidak dibayar). Besarnya pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2022 yaitu 17,56 persen menjadi 23,30 persen. Tingginya persentase jumlah pekerja yang berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas karena rata-rata pekerja jenis ini jumlah jam kerja dan tingkat keahliannya relatif rendah. Komposisi status pekerja yang juga disoroti adalah kategori pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap cukup tinggi yakni sebesar 19,56 persen dan pekerja yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sekitar 28,67 persen. Pada kelompok tersebut apabila didukung dengan sentuhan program pemberdayaan masyarakat maka dapat diharapkan akan menjadi cikal bakal suatu usaha yang kuat dan mapan. Untuk kelompok pengusaha dengan buruh tetap hanya 1,98 persen dan pekerja berstatus buruh/karyawan 25,42 persen. Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan non formal, dimana terjadi penumpukan pekerja pada sektor non formal karena biasanya tidak menuntut adanya klasifikasi tingkat ketrampilan dan keahlian yang tinggi. Dari 109.143 orang yang bekerja pada tahun 2023, masih ada diantaranya yang pekerjaannya berada di sektor informal.

Tabel 4.2 Penduduk bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, 2022 dan 2023

Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	18.332	19.590	12.335	11.700	30.667	31.290
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	16.771	15.286	5.969	6.090	22.740	21.376
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	1.542	1.987	0	171	1.542	2.158
Buruh/Karyawan/Pegawai	17.526	17.251	9.649	10.490	27.175	27.741
Pekerja Bebas	710	676	384	476	1.094	1.152
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	6.230	9.153	11.490	16.273	17.720	25.426
Total	61.111	63.943	39.827	45.200	100.938	109.143



# 5

## KONSUMSI DAN PENGELUARAN

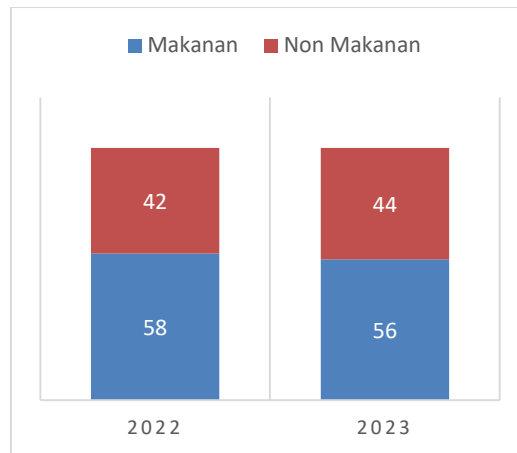
<https://buku.bps.go.id>



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

#### **A. Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan (non makanan), di mana pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan pengeluaran untuk barang-barang lainnya selain dari pengeluaran untuk makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita/Bulan, 2022-2023

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2022-2023

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persen (%)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>467.590</b>	<b>492.305</b>	<b>58,10</b>	<b>55,89</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>337.199</b>	<b>388.608</b>	<b>41,90</b>	<b>44,11</b>
Perumahan	194.076	229.967	24,12	26,10
Barang dan Jasa	64.959	75.482	8,07	8,57
Pakaian	15.276	15.557	1,90	1,77
Barang Tahan Lama	13.050	16.544	1,62	1,88
Lainnya	49.837	51.057	6,20	5,79
<b>Jumlah</b>	<b>804.789</b>	<b>880.913</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Selama periode 2022-2023 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Belu mengalami kenaikan dari Rp 804.789,- menjadi Rp 880.913,-. Bila dilihat proporsi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 58,10 persen pada tahun 2022 menjadi 55,89 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan mengalami kenaikan dari 41,90 persen menjadi 44,11 persen. Jika dilihat pada kategori penyusunnya, kenaikan proporsi pengeluaran pada kategori bukan makanan



terjadi pada hampir semua kategori kecuali barang dan jasa dan juga kategori lainnya yang mengalami penurunan pada tahun 2023.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,29 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp. 467.590,- menjadi Rp. 492.305,- perkapita sebulan. Sementara pada pengeluaran bukan makanan, terjadi kenaikan sebesar 15,25 persen dari Rp. 337.199,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 388.608,- perkapita sebulan pada 2023.

Pada pengelompokan distribusi pengeluaran, rumah tangga dibagi menjadi tiga kelompok yang tidak sama besar. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam pola pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran makanan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen bawah adalah sebesar Rp 256.830,- dan non makanan sebesar Rp 149.954,-. Nilai tersebut akan terlihat jauh berbeda jika kita membandingkan dengan pengeluaran kelompok masyarakat yang berada pada kelompok 20% atas.

Selain itu, kita juga dapat melihat pola pengeluaran antara kelompok masyarakat 40% bawah dengan kelompok masyarakat 40% bawah dan 20% atas di Kabupaten Belu. Pada kelompok masyarakat 40% bawah cenderung memiliki pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan dengan non makanannya, begitupun pada kelompok masyarakat 40% tengah dan 20% atas.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kuintil Pengeluaran, 2023 (Rupiah)

Distribusi Pengeluaran	Makanan	Non Manakan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Bawah	304.356	191.334	495.690
40% Tengah	487.494	357.988	845.482
20% Atas	875.965	841.987	1.717.952

## B. Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2015 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2023 sebanyak 1.554,20 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% bawah, 1.960,35 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% tengah, dan 2.518,53 kkal/hari untuk 20% atas. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk tahun 2023 sebagian besar belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi untuk kategori kecukupan energi. Hanya kelompok masyarakat 20% atas saja yang telah mampu memenuhi kebutuhan kalori perkapita per hari. Dalam hal konsumsi protein, rata-rata masyarakat Belu mengonsumsi 53,42 gram per kapita per hari. Untuk kelompok masyarakat 40% bawah dan 40% tengah belum memenuhi standar konsumsi protein yaitu dengan nilai 41,46 gram per kapita per hari untuk masyarakat 40% bawah dan 54,26 gram per kapita per hari untuk masyarakat 40% tengah. yang masih dibawah 57 gram per kapita per hari. Sedangkan kelompok masyarakat 20% atas sudah memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu konsumsi protein mencapai 75,56 gram per kapita per hari.

Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Kuintil Pengeluaran, 2023

Kuintil Pengeluaran	Kalori (kkal/kapita/hari)	Protein (gram/kapita/hari)
(1)	(2)	(3)
40% Bawah	1.554,20	41,46
40% Tengah	1.960,35	54,26
20% Atas	2.518,53	75,56

# 6

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://belukrabps.go.id>



Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas, sumber air minum, sumber air utama untuk keperluan sehari-hari, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

#### **A. Sumber Air Pada Rumah Tangga**

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang

jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Indikator lainnya yang dapat dilihat untuk mengukur kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat adalah sumber air utama yang digunakan untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Pada tahun 2023, hampir tidak ada penduduk di Belu yang memanfaatkan baik itu air kemasan, air isi ulang, ataupun air leding untuk keperluan mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Adapun tahun 2023 mayoritas masyarakat Belu memanfaatkan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. Pada tahun 2023, sebanyak 35,16 persen rumah tangga di Kabupaten Belu memanfaatkan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2023

<b>Indikator Kualitas Perumahan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga</b>
(1)	(2)
Sumber air utama untuk mandi, cuci, dll	
Air kemasan/isi ulang	0
Leding	11,09
Sumur bor/pompa	19,67
Sumur/mata air terlindung	35,16
Sumur/mata air tak terlindung	26,10
Lainnya	7,98

## **B. Fasilitas Rumah Tinggal**

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dalam menunjang kebersihan dan sanitasi yang baik dalam suatu rumah tinggal.

Sanitasi yang baik merupakan faktor utama yang mendukung bagi kesehatan masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan. Kelayakan sanitasi tersebut dapat dilihat dari jenis kloset yang digunakan, penggunaan fasilitas buang air besar milik sendiri, hingga ketersediaan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran.

Penyediaan sarana fasilitas buang air besar merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan fasilitas buang air besar yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan fasilitas buang air besar sendiri maupun fasilitas buang air besar yang sudah memiliki tangki septik. Pada tahun 2023, rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri sebanyak 87,74 persen.

Sistem pembuangan dengan jenis leher angsa bertujuan agar kotoran tidak langsung jatuh ke lubang penampungan kotoran. Hal ini secara tak langsung menghalangi mikroba dan bakteri yang keluar dari kotoran. Selain itu, penggunaan kloset leher angsa juga agar bakteri yang ada pada septic tank tidak keluar dan mencemari toilet. Pada tahun 2023, rumah tangga di Kabupaten Belu yang telah memiliki kloset dengan jenis leher angsa mencapai 90,44 persen

Sementara itu, kondisi berbeda justru terjadi pada persentase rumah tangga yang menguasai kepemilikan fasilitas buang air besar dengan tangki septik, SPAL. Pada tahun 2023, sebanyak 90,96 persen rumah tangga di Belu telah memiliki fasilitas buang air besar dengan tangki septik, SPAL di rumahnya.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan 2023

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga</b>
(1)	(2)
Kloset dengan leher angsa	90,44
Fasilitas buang air besar sendiri	87,74
Fasilitas buang air besar dengan tangki septik, IPAL	90,96

### C. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2023, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 88,85 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 11,15 persen baik itu kontrak/sewa, bebas sewa/rumah dinas/lainnya. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa lumayan banyak perantau yang tinggal di Kabupaten Belu.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

<b>Status Kepemilikan Rumah Tinggal</b>	<b>Persentase Rumah Tangga</b>
(1)	(2)
Milik Sendiri	88,85
Bukan Milik Sendiri	11,15



<https://belukab.bps.go.id>

**7**

**KEMISKINAN**



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

#### **A. Perkembangan Penduduk Miskin**

Penduduk miskin di Kabupaten Belu menunjukkan penurunan selama periode 2016-2022. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 33,95 ribu jiwa atau 15,95 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belu. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga pada tahun 2023 angka kemiskinan berhasil turun menjadi 33,19 ribu jiwa atau sebesar 14,37 persen.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Belu, 2017-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2017	33,95	15,95
2018	33,91	15,70
2019	34,08	15,54
2020	34,18	15,37
2021	35,41	15,67
2022	33,98	14,84
2023	33,19	14,37

## B. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Belu pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 459.111,00/kapita/bulan. Meningkat sebesar 10,23 persen dari Garis Kemiskinan pada Maret 2022. Pada periode Maret 2022–Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 2,07 mengalami penurunan sebesar 1,1 dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 3,87, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,86 menjadi 0,48.

Berdasarkan hasil Susenas 2016-2023, garis kemiskinan meningkat sebesar 52,57 persen atau naik Rp. 158.197 dari Rp. 300.914 perkapita perbulan pada tahun 2016 menjadi Rp. 459.111 perkapita perbulan pada tahun 2023. Peningkatan garis kemiskinan ini juga diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Belu dalam memenuhi kebutuhannya semakin meningkat. Ini berarti bahwa daya beli penduduk Belu setiap tahunnya semakin meningkat.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2016-2023

Indikator	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Garis Kemiskinan	300.914	319.280	330.944	349.424	372.087	379.280	416.519	459.111

<https://belukab.bps.go.id>



**8**

**LAMPIRAN**

<https://belukab.bps.go.id>





Lampiran 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, Maret 2023

No	Kecamatan	Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Luas Area	Kepadatan wilayah	persentase penduduk
1	Raimanuk	17768	99,73	179,42	99,03	7,69%
2	Tasifeto Barat	25598	100,08	224,19	114,18	11,08%
3	Kakuluk Mesak	23806	98,47	187,54	126,94	10,30%
4	Nanaet Dubesi	5112	96,39	60,25	84,85	2,21%
5	Kota Atambua	32747	99,73	24,90	1315,14	14,18%
6	Atambua Barat	25358	102,38	15,55	1630,74	10,98%
7	Atambua Selatan	27733	102,19	15,73	1763,06	12,01%
8	Tasifeto Timur	28275	100,86	211,37	133,77	12,24%
9	Raihat	14897	100,36	87,20	170,84	6,45%
10	Lasiolat	7503	101,31	64,48	116,36	3,25%
11	Lamaknen	13149	97,58	105,90	124,16	5,69%
12	Lamaknen Selatan	9062	100,04	108,41	83,59	3,92%
	Belu	231008	99,73	1284,94	179,78	100%

Lampiran 2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Belu, Desember 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Raimanuk	8872	8896	17768
2	Tasifeto Barat	12804	12794	25598
3	Kakuluk Mesak	11811	11995	23806
4	Nanaet Duabesi	2509	2603	5112
5	Kota Atambua	16351	16396	32747
6	Atambua Barat	12828	12530	25358
7	Atambua Selatan	14017	13716	27733
8	Tasifeto Timur	14198	14077	28275
9	Raihat	7462	7435	14897
10	Lasiolat	3776	3727	7503
11	Lamaknen	6494	6655	13149
12	Lamaknen Selatan	4532	4530	9062

Lampiran 3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas atas kepemilikan Telepon Seluler di kabupaten Belu tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Memiliki Telepon Seluler
1	Laki-laki	84,48
2	Perempuan	86,16
	Laki-Laki + Perempuan	84,67

## DAFTAR PUSTAKA

2010. Dasar-dasar Demografi Edisi 2. Tim Penulis Lembaga Demografi FEUI. Jakarta: Penerbit Salemba
2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
2024. Kabupaten Belu Dalam Angka 2024. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Atambua Selatan Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Nanaet Dubesi Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Tasifeto Timur Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Tasifeto Barat Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Lamaknen Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Lamaknen Selatan Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Raihat Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Raimanuk Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Kakuluk Mesak Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Atambua Barat Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Atambua Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
2023. Kecamatan Lasiolat Dalam Angka 2023. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

# **DATA**

# **MENCERDASKAN BANGSA**



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BELU

Jl. DR. G.A. Siwabessy No. 2, Atambua NTT 85714

Telp./Fax: (0389) 21317, Email: [bps5306@bps.go.id](mailto:bps5306@bps.go.id)

Homepage: <http://www.belukab.bps.go.id>